

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pengertian Akuntansi

Wahyudi (2007) akuntansi merupakan sistem yang memberikan informasi dengan cara memilah, mencatat, dan menginformasikan suatu peristiwa ekonomi pada suatu perusahaan atau pihak tertentu yang terkait

Dapat diinterpretasi, akuntansi mencakup :

1. Memilah kejadian ekonomi yang dimasukkan dalam laporan keuangan
2. Mencatat transaksi yang berlangsung secara rinci
3. Menginformasikan laporan keuangan berdasarkan transaksi yang telah terjadi

Menurut Irfani and Dahria (2009), akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada dasarnya akuntansi harus :

- a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil
- b. Memproses atau menganalisis data yang relevan
- c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

Menurut Jusup (2003), secara umum akuntansi memiliki artian, yaitu sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari tiga aktivitas, yaitu mengidentifikasi, pencatatan, dan komunikasi kejadian-kejadian ekonomis suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya

1.1.2 Prinsip Akuntansi

Menurut Tanjung (2012), ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi pelaporan keuangan pemerintah :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk mengakui pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Berdasarkan SAP lama (PP No. 24/2005)

- Basis pencatatan SAP lama yaitu basis kas menuju akrual
- Laporan keuangan pokok yang disusun pada SAP lama :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan SAP baru (PP No. 71/2010)

- Basis pencatatan SAP baru yaitu basis akrual

- Laporan keuangan pokok yang disusun pada SAP baru :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Nilai Historis (Historical Cost)

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan berbasis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e. Periodesitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

f. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

g. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan

tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

1.1.3 Perbedaan Sistem Akuntansi Cash Basis dan Accrual Basis

Menurut Mulyadi (2001), perbedaan sistem akuntansi cash basis dan accrual basis adalah :

Sistem akuntansi cash basis adalah sistem pembukuan, di mana seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai penheluaran dan biaya-biaya pada periode tersebut berdasarkan realitas pembayaran tunai. Sehingga hanya pengeluaran dan biaya-biaya serta penerimaan yang sudah diterima dengan tunai, yang bisa dimasukkan dalam perhitungan cash basis. Dalam sistem akuntansi cash basis, beban dicatat dalam transaksi jurnal entry ketika kas dikeluarkan dan beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban terjadi pada bulan ini. Untuk pendapatan dicatat ketika kas masuk dan pendapatan tidak diakui sampai dengan uang diterima. Sehingga pada metode cash basis ini mencerminkan jumlah uang yang ada sebenarnya.

Sistem akuntansi accrual basis adalah pengeluaran dan biaya-biaya yang diakui dan dibukukan pada periode tersebut berdasarkan pembiayaan tunai serta pengeluaran atau penerimaan tidak tunai yang jatuh tempo pada periode tersebut. Contoh komponen biaya pada accrual basis, misalnya biaya penyusutan, biaya

sewa, biaya dibayar di muka, biaya yang sudah jatuh tempo tapi pembayaran belum diterima.

1.1.4 Otonomi Desa

Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32 tahun 2004. Jadi, sebenarnya kini telah ada regulasi yang khusus mengatur desa, namun regulasi itu ada di level PP dan bukan UU. Definisi desa menurut PP No 72 tahun 2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan akan otonomi desa juga ada dalam UU No.32 tahun 2004. Dalam UU itu dijelaskan tentang definisi desa, yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Basis pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, baik UU No.32 tahun 2004 maupun PP No. 72 tahun 2005 itu me-mang mengamanatkan adanya desentralisasi kekuasaan bagi pemerintahan desa

1.1.5 Peranan Akuntansi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Desa menurut PP No 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Hariri (2008), kesejahteraan masyarakat adalah keterjaminan pendapatan, tingginya aset-aset produktif, serta kemampuan memelihara kesehatan yang baik. Desa memiliki hasil desa yang sangat melimpah, baik dari hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan. Dengan adanya hasil desa yang melimpah tersebut tentu dibutuhkan sistem akuntansi yang tepat dan sesuai untuk mengelolanya. Namun tidak semua masyarakat desa mampu dan mengerti untuk melaksanakan sistem akuntansi yang sesuai dengan sistem yang ada.

Bapemas (2014) Dalam BUMDes yang merupakan badan usaha komersil yang membantu peningkatan masyarakat desa, sistem akuntansi yang berjalan adalah sistem pencatatan Bujitu yang merupakan milik UPKu. BUMDes sendiri belum memiliki sistem akuntansi. Sistem pencatatan keuangan Bujitu sementara dianggap mempermudah masyarakat desa dalam melakukan pencatatan atas hasil kinerja desanya.

2.1.6 Pengertian BUMDes

Berdasarkan Bapemas (2014), pada prinsipnya BUMDes dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus sebagai motor penggerak perekonomian desa dilaksanakan baik melalui konsolidasi atau integrasi Unit Pengelola Keuangan

(UPKu) maupun Lembaga Ekonomi Desa (LED) lainnya. Pembentukan BUMDes juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa serta mendukung optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

2.1.7 Peranan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Bapemas (2014) Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada beberapa jenis usaha yang ditangani, diantaranya :

1. Unit pasar desa

BUMDes memfasilitasi di desa untuk dapat memiliki pasar desa sendiri di masing-masing desa untuk mempermudah pendistribusian dan penjualan hasil desa

2. Unit perdagangan

BUMDes membantu perdagangan hasil dari sumber daya yang ada di desa agar mudah untuk dipasarkan

3. Unit LKM/USP

BUMDes memfasilitasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) menjadi alternatif pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat guna menggerakkan ekonomi masyarakat desa. LKM berfungsi sebagai lembaga

keuangan yang mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan

4. Unit jasa pelayanan

BUMDes memfasilitasi dan membantu desa dalam hal pelayanan yang tepat dan sesuai agar hasil desa dapat maksimal

5. Unit pertanian

BUMDes memfasilitasi pendistribusian dan penjualan hasil desa yang berupa hasil pertanian untuk mempermudah kinerja dari masyarakat desanya

6. Unit peternakan

BUMDes memfasilitasi pendistribusian dan penjualan hasil desa yang berupa hasil peternakan untuk mempermudah kinerja dari masyarakat desanya

7. Unit perikanan

BUMDes memfasilitasi pendistribusian dan penjualan hasil desa yang berupa hasil perikanan untuk mempermudah kinerja dari masyarakat desanya

8. Unit pariwisata

BUMDes membantu memfasilitasi dan mempromisikan unit pariwisata yang dimiliki suatu desa untuk mudah diperkenalkan ke masyarakat luar dan agar dapat menambah hasil pendapatan di desa

9. Unit lainnya

Dengan adanya unit usaha tersebut, BUMDes memiliki beberapa tujuan secara eksplisit guna meningkatkan perekonomian desa, diantaranya :

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa
3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber

4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

2.1.8 Struktur Organisasi BUMDes

Menurut Bapemas (2014), struktur yang berjalan dalam organisasi BUMDes adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

- Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya
- Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya
- Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai evaluator kinerja BUMDes

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasihat operasional BUMDes

- Dewan Komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes
- Dewan Komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes
- Dewan Komisaris bertindak sebagai desiminasi yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes

- Dewan Komisaris bertindak sebagai negoisor yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga
- Dewan Komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUMDes
- Dewan Komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUMDes

Bagian Keuangan

Bagian Keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes

- Bagian Keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUMDes sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha
- Bagian keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan BUMDes
- Bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMDes
- Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris

Manajer BUMDes

- Manajer BUMDes bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya
- Manajer BUMDes bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya
- Manajer BUMDes bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya

- Manajer BUMDes bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- Manajer BUMDes bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes
- Manajer BUMDes bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMDes
- Manajer BUMDes bertindak sebagai tokoh dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDes dalam acara-acara penting
- Manajer BUMDes bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
Sekretaris
- Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari
- Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan
- Menyusun laporan kinerja unit usaha
- Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes
- Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- Bertanggungjawab kepada Manajer Unit
Bendahara
- Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes
- Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes
- Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar unit usaha BUMDes

- Bertanggungjawab kepada Manajer Unit

Karyawan

- Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen
- Membantu Manajer Unit dan melayani konsumen
- Membantu Manajer Unit dalam melakukan pengecekan barang-barang dagangan
- Bertanggungjawab kepada Manajer Unit

2.1.9 Sistem Akuntansi yang Ada di BUMDes

Bapemas (2014) Sistem akuntansi yang berjalan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini menggunakan sistem pencatatan keuangan Bujitu (Buku Siji sampai Pitu). Sistem pencatatan keuangan Bujitu ini merupakan milik Unit Pengelola Keuangan (UPKu) yang ada sebelum BUMDes terbentuk. BUMDes sendiri belum memiliki sistem akuntansi. Dalam Bujitu melakukan pencatatan baik tunai maupun non tunai, yang berisikan :

1. Buku Satu

Merupakan buku yang mencatat mutasi kas harian secara tunai. Buku tersebut dipegang oleh bendahara

2. Buku Dua

Berisi mutasi kas harian, di dalamnya terdapat buku tabungan, buku pinjaman, dan lain-lain. Buku tersebut dipegang oleh bendahara

3. Buku Tiga

Merupakan buku yang mencatat kas masuk secara tunai. Buku tersebut dipegang oleh sekretaris

4. Buku Empat

Merupakan buku yang mencatat kas keluar secara tunai. Buku tersebut dipegang oleh sekretaris

5. Buku Lima

Merupakan buku yang berisi jurnal memorial, yaitu transaksi yang dilakukan secara non tunai. Buku tersebut dipegang oleh sekretaris

6. Buku Enam

Merupakan buku yang berisi neraca saldo, yang merupakan hasil dari data yang ada dari buku tiga, buku empat, serta buku lima

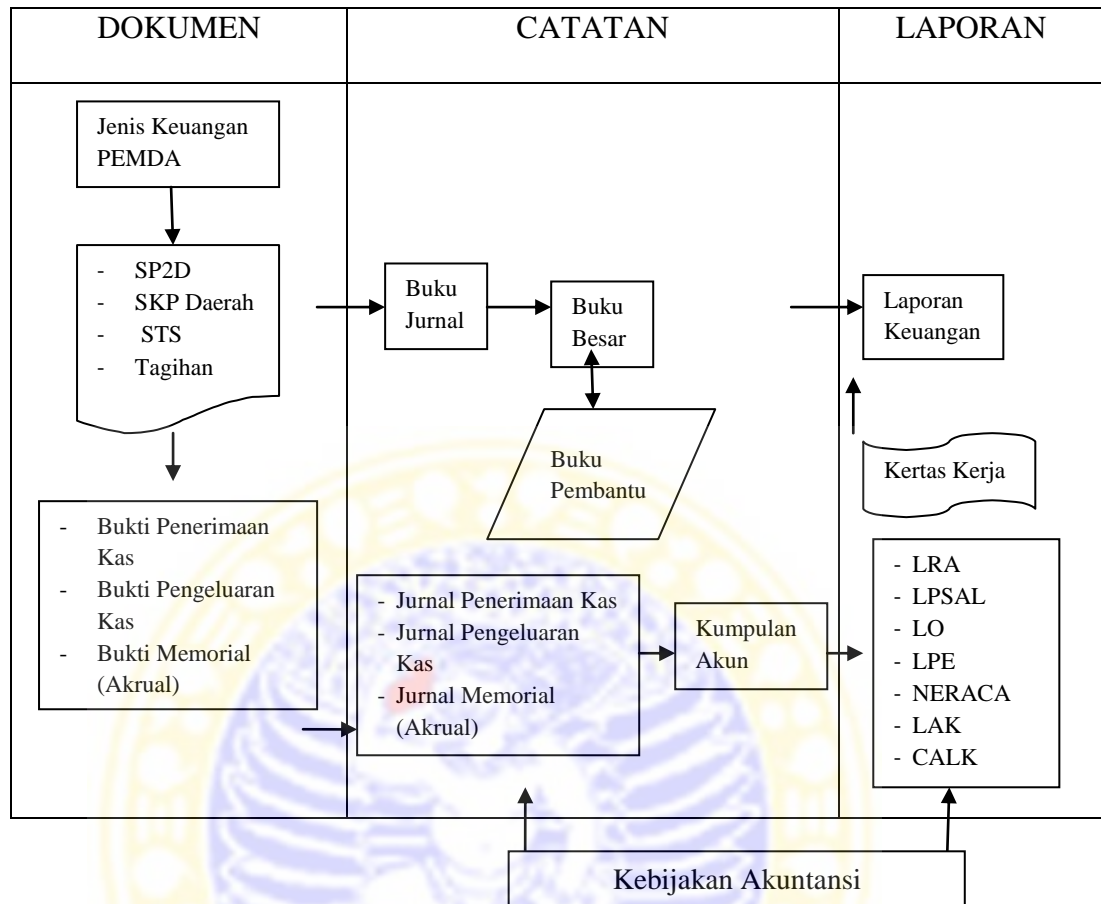
7. Buku Tujuh

Merupakan buku yang berisi laporan keuangan, dan menghasilkan neraca serta SHU

2.1.10 Sistem Pencatatan Keuangan BUMD dan BUMDes

Sistem pencatatan keuangan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sistem pencatatan keuangan untuk Badan Keuangan Milik Desa (BUMDes) berbeda, berikut gambar sistem pencatatannya :

Berdasarkan BPKP (2013)

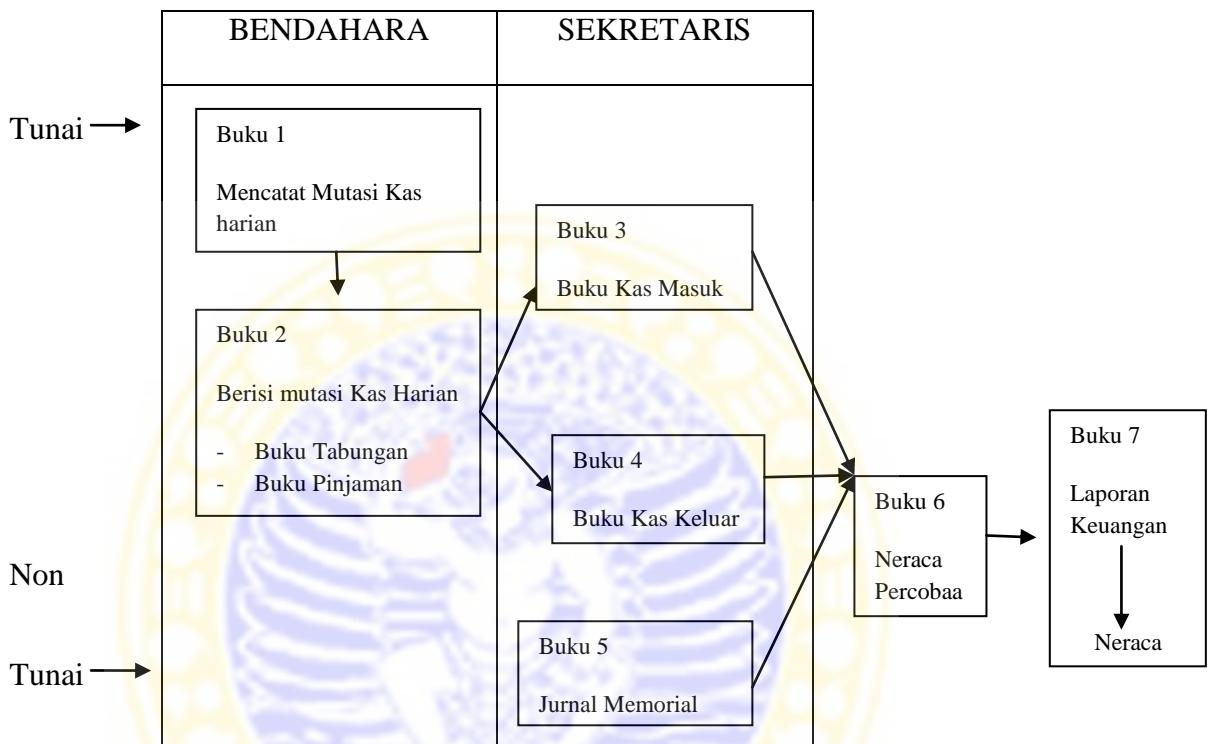


Gambar 2.1 Sistem Pencatatan Akuntansi BUMD

BUMD berperan mendorong serta masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, dan menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati masyarakat. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan BUMD berasal dari pemerintah daerah guna menunjang terlaksananya kegiatan BUMD dan laporan keuangannya dilaporkan ke Gubernur/Walikota/Bupati sebagai pertanggung jawaban dari penggunaan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah. BUMD dibentuk untuk mewadahi atau mengurus kekayaan alam yang terdapat atau terkandung di daerah tersebut, misalnya migas, air

Sistem Pencatatan Keuangan BUMDes

Berdasarkan Bapemas (2014) :



Gambar 2.2 Sistem Pencatatan Akuntansi BUMDes

BUMDes ini didirikan sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan perubahan sebagian dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta mengatur bahwa pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dana BUMDes berasal dari pemerintah daerah serta dana dari masyarakat. Laporan keuangan BUMDes dimonitor oleh Kepala Desa lalu diputar kembali pada masyarakat desa. Unit yang

dibawahi oleh BUMDes, diantaranya : unit pasar desa, unit perdagangan, unit LKM/USP, unit jasa pelayanan, unit pertanian, unit peternakan, unit perikanan, unit pariwisata, dan unit lainnya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

2.2.1 Ramadana (2008)

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Pembahasan :

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sehingga desa merupakan miniature dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran badan usaha milik desa ini sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan badan usaha milik desa ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan desa. BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

Kesimpulan :

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara pemerintah memberika modal dan pengelolaan hasil desanya agar lebih dapat dimafaatkan dengan sesuai dan lebih menjamin kehidupan masyarakat desa. BUMDes juga diharapkan mampu menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing serta dapat menggerakkan ekonomi desa.

2.2.2 Irfani and Dahria (2009)

Peran Akuntansi dalam Operasi Bisnis

Pembahasan :

Peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh semua pihak yang berkepentingan. Bahkan organisasi pemerintah pun, sekarang ini sedang berupaya untuk menerapkan konsep-konsep akuntansi pada pola manajemennya untuk tujuan pertanggungjawaban kegiatan. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat inilah yang menuntun para pelaku ekonomi untuk lebih memahami data akuntansi yang dapat memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kesimpulan :

Peranan akuntansi saat ini sangat dibutuhkan bagi segala kalangan, baik organisasi laba maupun organisasi nirlaba. Setiap organisasi dan perusahaan membutuhkan akuntansi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaannya. Oleh karen itu perkembangan perekonomian menuntun para pelaku ekonomi untuk dapat memahami data akuntansi yang dapat memberikan informais

keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.3 Research Question dan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan model analisis studi kasus, menurut Bungin (2009) model analisis studi kasus lebih memungkinkan untuk memperoleh data mendalam serta komprehensif dalam mengekspresikan suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan model analisis studi kasus pada BUMDes Sentosa Abadi di Desa Waruk, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan yang merupakan salah satu BUMDes yang mulai maju dan berkembang. BUMDes ini didirikan sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan perubahan sebagian dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta mengatur bahwa pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Di dalam BUMDes juga dibutuhkan peranan akuntansi untuk menunjang kinerjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya serta untuk laporan keuangan BUMDes. Pada BUMDes saat ini menggunakan sistem pencatatan Bujitu (Buku Siji Sampai Pitu), sistem pencatatannya masih menggunakan basis kas yang merupakan milik UPKu, BUMDes sendiri belum memiliki sistem akuntansi untuk pembuatan laporan keuangannya. Untuk sementara ini sistem pencatatan Bujitu dianggap mudah dipahami oleh masyarakat desa karena pembuatannya yang dibuat secara sederhana. BUMDes

memiliki kendala belum memiliki sistem akuntansi tersendiri dikarenakan belum adanya sistem akuntansi yang sesuai untuk BUMDes dari pemerintah, SDM di desa yang masih rendah serta masih kurang pelaksana yang mengerti dengan tepat tentang akuntansi. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta pemerintah untuk memberikan pelatihan tentang akuntansi yang berlaku umum pada pelaksana BUMDes agar dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dan akurat.

Pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini, diantaranya :

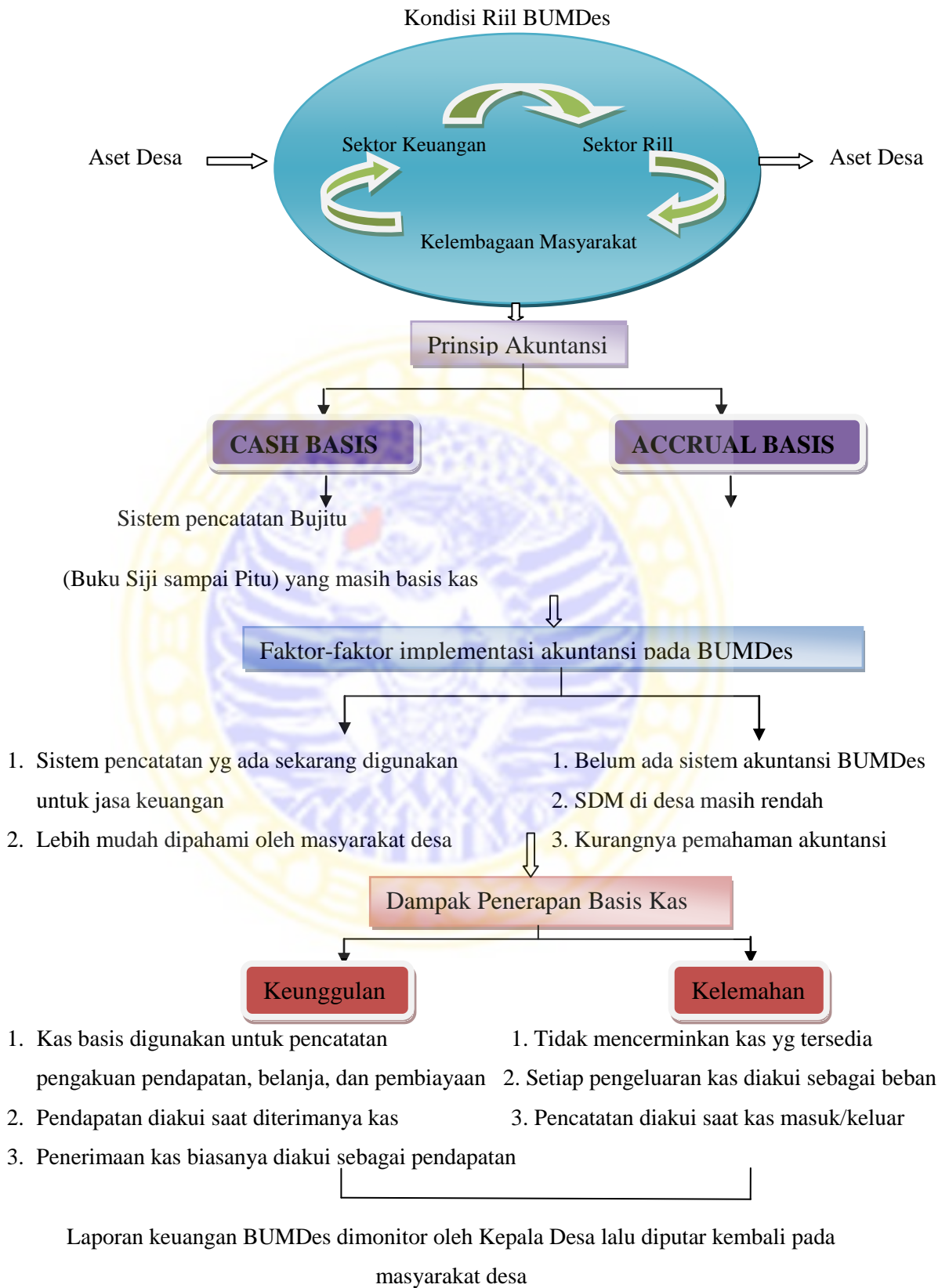
1. Apa saja yang ditangani oleh BUMDes Sentosa Abadi ?
2. Aliran dana untuk BUMDes Sentosa Abadi berasal dari mana saja ?
3. Bagaimana sistem akuntansi yang berjalan pada BUMDes Sentosa Abadi ?
4. Bagaimana sistem pencatatan keuangan pada BUMDes Sentosa Abadi ?
5. Apa saja isi dari sistem pencatatan keuangan Bujitu ?
6. Mengapa belum menggunakan sistem akuntansi yang sudah berlaku umum ?
7. Untuk transaksi yang sudah jatuh tempo, yang dimasukkan dalam pendapatan apa yang sudah berupa kas saja atau yang belum berupa kas juga ?
8. Bagaimana penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode ?
9. Apakah sistem akuntansi yang ada sekarang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ?
10. Bagaimana jika sistem akuntansi yang sudah ada sekarang pada BUMDes diganti dengan sistem akuntansi yang berlaku umum dan sesuai ketentuan pemerintah ?
11. Pertanggung jawaban laporan keuangan BUMDes Sentosa Abadi diserahkan kepada pihak mana ?

Diharapkan ke depannya BUMDes semakin meningkat perkembangannya sehingga sistem akuntansi yang digunakan bisa sesuai dengan sistem akuntansi

yang sudah berlaku umum dan bisa setara dengan badan usaha lainnya yang sudah awal ada dengan bantuan peranan dari Pemerintah.



2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.3 Kerangka Berfikir